

ANALISIS KEBUTUHAN TERHADAP LULUSAN S2 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI DI JAKARTA

Suparno

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
suparno@unj.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the needs of graduates S2 Economic Education Program which includes: (1) the number of applicants and the capacity of similar study programs in the last 3 years; (2) the number and the last teacher education; (3) documents graduate profile and learning outcomes (learning outcomes), the curriculum structure and distribution of similar subjects and sejenisang Prodi; (3) the structure of the curriculum and the distribution of subjects similar but different study program levels; (4) tracking studies alumnus that contains a waiting period of graduates get jobs, work field conformity with graduate skills, achievement of the graduate profile that is designed study programs in the workplace and so in the last 3 years; (5) Data job along with the necessary qualifications, and (6) estimate the number of jobs available per year.

The results showed that: (1) number of applicants and the capacity program similar studies in the past 3 years has increased (2) Applicants primary education level S2 is teachers (3) Profile graduate courses Economic Education S2 is becoming educators / teacher / lecturer in economics, education personnel are qualified, researchers in the field of education and the economy, education managers, consultants, education and economics. (4) Economic Education at Bachelor (S1) there are 116 universities with 1,434 permanent lecturers and 49 526 active students. (5) Graduate Economics Education courses average S2 are people already working who want to improve or expand the choice of working careers, and (6) Data jobs for graduates S2 economic education is still a lot on the function as an educator at the College / Lecturer with amount per year of about 10 people.

Keywords: Needs Analysis, S2 Graduate Study Program of Economic Education.

PENDAHULUAN

Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada 4 Agustus 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, hakikatnya bukan merupakan perubahan karena inisiatif dan dinamika Perguruan Tinggi. Akan tetapi menjadi Kebijakan Nasional dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) saat ini karena perubahan dan tuntutan pasar kerja yang sudah semakin tinggi terhadap lulusan Perguruan Tinggi.

Di sisi lain, menjamurnya PT dengan sistem operasionalnya yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadikan menjadikan problem baru. Akibat tidak memenuhi SNP, mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan menjadi korban. Hal inilah salah satu dari sekian sebab Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) mengeluarkan kebijakan untuk menutup ratusan PT yang tidak memenuhi standar tersebut.

Kondisi yang dialami PT juga tidak jauh beda dengan dunia pendidikan dasar Indonesia secara umum. Sampai-sampai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, melontarkan pernyataan bahwa pendidikan kita saat ini tengah "gawat darurat." Hal tersebut berdasarkan data Program Penilaian Pelajar Internasional/*Program for*

International Student Assessment (PISA) yang bekerjasama dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), diketahui bahwa 76 persen anak Indonesia masuk dalam kategori *low achievers*. Sementara anak yang mencapai level tertinggi hanya 0,3 persen.

Fenomena pendidikan tinggi dan pendidikan secara umum, meniscayakan lulusan PT yang profesional guna memperbaiki kondisi tersebut. Sebenarnya, dalam kurikulum PT khususnya dalam KKNi, sudah diuraikan secara jelas bahwa lulusan jenjang Strata 2 (S2) merupakan tenaga ahli yang dapat berfikir secara analitis, kebijakan secara profesional, serta mencapai kualifikasi pada great 8. Maka, lulusan PT dengan kualifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi pionir-pionir perbaikan pendidikan bangsa; baik di level dasar maupun pendidikan tinggi.

Kebutuhan mendesak akan lulusan S2, juga dialami aneka sektor dunia usaha (DU)/dunia industri (DI) di berbagai bidang. Dengan kata lain, beberapa profesi pada berbagai bidang saat ini sudah mensyaratkan pelamarnya memiliki ijazah S2. Misalnya, banyak yayasan pendidikan swasta yang sudah mensyaratkan pengelola dan kepala sekolah mereka lulusan S2 dan bahkan Doktoral (S3). Para pengelola dinas pendidikan rata-rata sudah bergelar Master (S2). Hal tersebut menjadi wajar,

mengingat pendidikan S2 saat ini sudah menjadi tuntutan pasaran dunia kerja.

Pada level pendidikan dasar dan menengah juga demikian. Para guru saat ini sudah diwajibkan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang S2, bahkan S3. Data ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Riau, Dwi Agus Sumarno 2015, bahwa guru Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang belum berpendidikan S2 agar segera melanjutkan pendidikan. Bahkan dengan tegas, Dwi Agus Sumarno, menyatakan bahwa jika guru SMA sederajat pada 2018 belum S2, maka mereka siap-siap pindah mengajar menjadi guru SMP. Guna mendukung kebijakan tersebut, maka Dinas Pendidikan Riau telah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia, baik di Provinsi Riau sendiri, maupun dengan universitas yang berada diluar Riau.

Data peluang lulusan S2 juga bisa dilihat pada pengumuman penerimaan CPNS di Kantor Pos Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (31/10). Para pelamar kecewa karena kualifikasi pendidikan bagi formasi jabatan guru SMA dan SMK disyaratkan lulusan strata dua (S2). Persyaratan tersebut, menurut para pelamar, menutup rapat kesempatan mereka untuk mengisi lowongan formasi bagi jenjang SMA dan SMK. Kualifikasi pendidikan pelamar untuk semua formasi

tersebut adalah S1, kecuali formasi guru SMA dan SMK yang mensyaratkan jenjang S2.

Data sebagaimana diuraikan, menegaskan bahwa peluang kerja lulusan S2 terbuka lebar. Ini artinya, tidak ada pilihan bagi PT selain menyediakan pendidikan jenjang S2 yang bermutu, berkualitas, efektif dan efisien. Diharapkan lulusan S2 ini mampu mengisi kebutuhan kerja, mengaktualisasikan ilmunya secara tepat, dan tentu saja mampu membenahi persoalan pendidikan bangsa yang tegah gawat darurat tersebut.

Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan mutu dosen terutama dalam kaitannya dengan pendidikan lanjut. Permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian antara besarnya jumlah dosen yang memerlukan pendidikan dengan jumlah mereka yang telah berkesempatan mengikuti pendidikan lanjut. Untuk dapat mengikuti program S2 dan S3 Pendidikan Ekonomi dihadapkan pada keterbatasan lembaga penyelenggara program LPTK, di samping itu adanya keharusan linier antara kebutuhan dosen Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dengan lulusan S2 Pendidikan Ekonomi.

Hal tersebut sungguh merupakan suatu tantangan besar yang harus diantisipasi oleh dunia pendidikan tinggi. Khususnya dalam upaya meningkatkan jumlah jenjang pendidikan S2 dan S3 bidang pendidikan ekonomi di Indonesia. Terbatasnya jumlah

sarjana pendidikan ekonomi berjenjang S2 dan S3 di atas, juga menunjukkan gambaran 'mutu' sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia dalam bidang ini masih sangat kecil.

Melihat pada posisi Indonesia dalam pengaruh globalisasi yang menuntut tenaga pendidikan ekonomi 'pada kualitas tertentu' guna mampu menunjang tercapainya pembangunan Indonesia di masa datang, sudah merupakan keharusan bagi, secara sungguh-sungguh memulai melaksanakan program pendidikan jenjang S2 dan untuk kemudian dikembangkan menjadi program S3.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan diperlukan untuk mengumpulkan gambaran yang tepat dalam memecahkan masalah secara tepat terhadap suatu kebutuhan sehingga terdapat skala prioritas. Kaufman dan English (Kaufman, 1987) menyatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan proses formal yang menentukan jarak antara produksi dengan kebutuhan produksi. Menurut Nadler (Mandra, 2000), untuk mengetahui kebutuhan ini tidaklah mudah karena terlebih dahulu harus mengidentifikasi kebutuhan pada institusi yang dianalisis. Peneliti terlebih dahulu harus membuat daftar kebutuhan analisis dari institusi yang akan diteliti.

Setelah peneliti mendapatkan daftar kebutuhan pada institusi tersebut, maka selanjutnya peneliti mensinkronkan daftar kebutuhan tersebut pada tingkat pasar kerja

Jika dikaitkan dalam konteks pembelajaran, maka analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran guna memilih dan menentukan media yang tepat dan relevan, untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mengarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Singkatnya, analisis kebutuhan ditujukan untuk menentukan keperluan atau harapan yang ingin dimiliki warga belajar, setelah warga belajar menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kualitas dari kualifikasi yang harus dipenuhi.

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik PT disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut sebagai dosen. Menurut Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, khususnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No. 12, Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pada Pasal 59 disebutkan bahwa bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Universitas merupakan PT yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Selanjutnya dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, bab VI pasal 19, ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

PT sebagai lembaga pendidikan profesional, mengembangkan mutu dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, Bab XI pasal 40, ayat (1) butir (c) yang menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan mutu. Hal tersebut menjadi tuntutan bagi PT untuk memenuhi kualitas dan layanan pendidikan dalam jenjang post graduated. Lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Depdiknas RI, Nomor: 108/DIKTI/Kep/2001, tentang pedoman pembukaan Prodi dan atau jurusan menjadi pedoman operasional PT dalam membuka Prodi baru.

Pada pasal 18 UU SISDIKNAS disebutkan bahwa program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana juga menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau

menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional.

Selanjutnya pada pasal 19 UU SISDIKNAS disebutkan bahwa program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program magister (S2) bertujuan mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan diri menjadi professional.

Jika dilihat dari segi kurikulumnya, program magister terdiri atas tiga komponen, yaitu (a) Mata kuliah Umum (MKU): minimum 4 sks; (b) Mata kuliah Dasar Keahlian (MKDK): minimum 4 sks; dan (c) Mata kuliah Keahlian (MKK), mencakup sejumlah MK Spesialisasi Bidang Studi, MK Proses Belajar-Mengajar Bidang Studi (PBM BS), MK Pembentukan Keahlian Bidang Studi (PK BS), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Tesis.

A. Prodi Pendidikan Ekonomi S2

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pendidikan Ekonomi memiliki peranan dalam pembentukan jiwa kewirausahaan peserta didik yang harmonis. Pendidikan Ekonomi memfokuskan diri pada kebutuhan perkembangan peserta didik dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan intrapersonal, interpersonal, *linguistic*, *logic* matematik, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, serta kecerdasan emosional. Mengingat tugas berat Pendidikan Ekonomi tersebut, maka diperlukan guru-guru yang menguasai ilmu ekonomi secara utuh dan mendalam, sehingga dapat menjadi pembimbing dan pendorong para siswa untuk mengembangkan kemampuannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), khususnya Pasal 8, bahwa setiap guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Kompetensi pedagogik, terkait dengan penguasaan teori ilmu pendidikan dan penguasaan proses pembelajaran. Kompetensi kepribadian terkait dengan kepribadian atau budi pekerti seorang pendidik yang harus dimiliki baik di kelas, lingkungan

sekolah, maupun di masyarakat. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan seorang pendidik dalam keterampilan berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Sedangkan kompetensi profesional bagi guru ekonomi berkaitan dengan kompetensi di bidang keilmuan yang meliputi konsep dan teori, serta mengkonstruksi materi ajar ke dalam kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan-pendekatan yang relevan.

Pada abad 21, pembangunan Indonesia akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses perkembangan global. Akibatnya, Indonesia makin berada pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadikannya masuk ke dalam proses perubahan yang bersifat global. Dampak globalisasi menyangkut segala aspek segi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik dari segi pendidikan, politik, kebudayaan, pandangan hidup dan terutama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, di Indonesia sangat dituntut untuk mampu 'menyiapkan' sumber daya manusia kualitas tinggi yang memiliki berbagai bidang kemampuan yang spesifik.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan, pendidikan di Indonesia harus menyiapkan diri. Persiapan yang terpenting dalam dunia pendidikan bukanlah mengacu pada acuan kelayakan ekonomi maupun materiil, namun pada penyediaan sumber daya manusia. Dengan kata lain, penyiapan sumber daya manusia yang mampu "survive" dan mengembangkan diri pada era globalisasi, merupakan tugas penting dan utama dunia pendidikan, tidak terkecuali di dunia pendidikan tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pendidikan Ekonomi pada jenjang Magister merupakan suatu proses yang kompleks dan terintegrasi meliputi manusia, alat dan sistem termasuk di antaranya gagasan, prosedur, dan organisasi. Prodi Pendidikan Ekonomi S2 merupakan suatu bidang profesi yang terbentuk dengan adanya usaha terorganisasikan dalam mengembangkan teori, melaksanakan penelitian dan aplikasi praktis perluasan serta peningkatan sumber belajar yang beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan ekonomi secara integratif, yaitu secara rasional berkembang dan berintegrasi dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Pendidikan Ekonomi perlu dipikirkan dan dibahas

terus-menerus, karena adanya kebutuhan riil yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (i) tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar; (ii) keharusan meningkatkan mutu pendidikan ekonomi, (iii) penyempurnaan sistem pendidikan dengan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan; (iv) peningkatan partisipasi masyarakat dengan pengembangan dan pemanfaatan berbagai wadah dan sumber pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Ekonomi dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan

SDM dan peningkatan daya saing.

Berdasarkan kajian tim Pendidikan Ekonomi FE-UNJ, *Body of knowledge* dari Prodi Pendidikan Ekonomi S2 berasal dari ilmu-ilmu sosial (*Social Science*) yang bermula dari *moral philosophy*. Namun demikian Pendidikan Ekonomi tidak murni *social science*, karena dalam pengamatannya pada manusia dan masyarakat, Pendidikan Ekonomi menggunakan alat yang biasa digunakan ilmu-ilmu alam (*natural science*/Filsafat alam) yakni: matematika, statistik bahkan ekonometrika.

Adapun posisi Pendidikan Ekonomi dalam rumpun keilmuan secara jelas, sebagaimana terlihat sebagai berikut:



Gambar 1
Hubungan Pendidikan Ekonomi dengan *Natural and Social Studies*

Lulusan Pendidikan Ekonomi jenjang S2 diharapkan memiliki karakter sebagai pemikir, perekayasa, dan praktisi profesional dan akademis dalam pembelajaran ekonomi yang

berwawasan global, bertindak lokal. Adapun kompetensi lulusan yang diharapkan antara lain: a) Kritis (peka dan responsif) terhadap dinamika praktik pendidikan ekonomi nasional, dan b) Kreatif dan

Gambar 2
Level Pencapaian Lulusan Pendidikan Ekonomi S2 Pada KKNI
Melalui Berbagai Jalur

Pohon keilmuan untuk bidang ilmu ekonomi adalah sesuatu yang sangat terus mengalami perkembangan. Bermula dari ilmu ekonomi (*Economics*) sebagai *Economics Theory*, dengan *micro economics* dan *macro economics*, kemudian lahir ekonomi pembangunan, ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi pertanian, ekonomi industri, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi politik, hingga sosiologi ekonomi.

Dari perkembangan ilmu ekonomi pula, kemudian lahirlah berbagai aliran keynesian, aliran klasikal, dengan penekanan yang berbeda dalam pembangunan

ekonomi. Demikian pula lahir ekonomi kerakyatan, serta fenomena ekonomi syariah yang berbasis Al-quran dan Al-hadist. Demikian juga pada level *applied economics*, melahirkan produk perbankan yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa dinamis Ilmu ekonomi dan Pendidikan Ekonomi dalam perkembangan bidang ilmu, yang mana semua itu semata ingin mencari kebenaran yang sejati dalam menjelaskan perilaku manusia dan masyarakat. Hal tersebut tentunya bermuara untuk kehidupan manusia dan pembangunan bangsa Indonesia sendiri.



Gambar 3
Hubungan Pendidikan Ekonomi dengan Beberapa Bidang Ilmu

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan kajian dan analisis data, saat ini jumlah lulusan yang dihasilkan Prodi

Pendidikan Ekonomi S2, maupun Prodi sejenis yang sudah ada belum sebanding dengan kebutuhan pasar. Salah satu

indikator bahwa lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 sangat dibutuhkan pasar, adalah guru-guru SMA/SMK/MA yang membutuhkan kualifikasi yang relevan dengan kualifikasi S1 mereka.

Adapun jumlah keseluruhan perguruan tinggi LPTK yang menyelenggarakan perkuliahan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 di Indonesia hingga Tahun 2015 terdapat 15 Perguruan tinggi, dengan penyelenggara Program studi Pendidikan Ekonomi S1 terdapat 116 PT dengan 1434 Dosen Tetap dan 49626 mahasiswa.

Berdasarkan perhitungan rata-rata mahasiswa setiap tahun akademik dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara, maka dapat diketahui daya tampung Prodi Pendidikan Ekonomi S2 sejumlah 25 orang mahasiswa untuk reguler dan 20 mahasiswa untuk eksekutif. Secara lebih rinci mereka yang telah dan akan mengikuti Prodi Pendidikan Ekonomi S2 dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jumlah peminat dan daya tampung prodi sejenis dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014 sebanyak 11,9% dan tahun 2013 ke 2015 sebesar 53,37%. Selanjutnya terdapat 15 PT yang membuka Prodi Pendidikan Ekonomi S2 dengan 73 dosen tetap, dan total jumlah mahasiswa sebanyak 740 orang; (2) Peminat utama untuk jenjang

pendidikan S2 untuk guru-guru di DKI dengan jumlah tahun 2015 sebanyak 102.829 orang di mana 12.914 orang mengajar pada jenjang SMA. (3) Profil lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 adalah menjadi tenaga pendidik/guru/dosen bidang ekonomi, tenaga kependidikan yang mumpuni, peneliti di bidang pendidikan dan ekonomi, manajer pendidikan, konsultan bidang pendidikan dan ekonomi. Capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berbasis KKNI. Selain itu, capaian keterampilan lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 mengacu pada 4 pilar UNESCO. Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah prodi sejenis dan sejenis untuk S2 Pendidikan ekonomi menempuh 72 SKS yaitu: (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 SKS, (b) Mata Kuliah Keilmuan (MKK) 19 SKS, (b) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) Umum 23 SKS, dan (b) Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) Bidang Studi 21 SKS; (4) Pendidikan Ekonomi pada program Sarjana (S1) terdapat 116 Perguruan Tinggi dengan 1.434 Dosen tetap dan 49.526 mahasiswa aktif. Struktur kurikulum Pendidikan Ekonomi S1 ditempuh dengan beban 146 sks yaitu: (a) Mata Kuliah Umum (MKU) 13 SKS, (b) Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 12 SKS, (c) Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang (MKBK) 107 SKS, dan (d) Mata Kuliah

Pembelajaran (MKP) 14 SKS; (5) Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi S2 rata-rata adalah orang yang sudah bekerja yang ingin meningkatkan karier atau memperluas pilihan bekerja, dan (6) Data lowongan kerja untuk lulusan S2 pendidikan ekonomi masih banyak pada fungsi sebagai pendidik di Perguruan Tinggi/ Dosen dengan jumlah per tahun sekitar 10 orang.

KESIMPULAN

1. Jumlah peminat dan daya tampung prodi sejenis dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan penelusuran data diketahui bahwa jumlah mahasiswa dari 3 Prodi Pendidikan Ekonomi S2 mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014 sebanyak 11,9% dan tahun 2013 ke 2015 sebesar 53,37%. Selanjutnya terdapat 15 PT yang membuka Prodi Pendidikan Ekonomi S2 dengan 73 dosen tetap, dan total jumlah mahasiswa sebanyak 740 orang.
2. Peminat utama untuk jenjang pendidikan S2 adalah guru-guru di DKI dengan jumlah tahun 2015 sebanyak 102.829 orang di mana 12.914 orang mengajar pada jenjang SMA. Berdasarkan data Sertifikasi Guru SMA yang mengajar Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Ekonomi di wilayah DKI Jakarta Tahun 2013 jumlahnya sebanyak 41 orang. Setahun kemudian, berdasarkan data Sertifikasi Guru SMA yang mengajar Mapel Pendidikan Ekonomi di wilayah DKI Jakarta tahun 2014 jumlahnya sebanyak 19 orang. Selanjutnya berdasarkan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 Mapel Ekonomi, diketahui di Jakarta Timur terdapat 186 Guru Mapel Ekonomi yang masih berpendidikan S1 Pendidikan Ekonomi.
3. Profil lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 adalah menjadi tenaga pendidik/guru/dosen bidang ekonomi, tenaga kependidikan yang mumpuni, peneliti di bidang pendidikan dan ekonomi, manajer pendidikan, konsultan bidang pendidikan dan ekonomi. Capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berbasis KKNi. Selain itu, capaian keterampilan lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi S2 mengacu pada 4 pilar UNESCO. Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah prodi sejenis dan sejenjang untuk S2 Pendidikan ekonomi menempuh 72 SKS yaitu: (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 9 SKS, (b) Mata Kuliah Keilmuan (MKK) 19 SKS, (b) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) Umum 23 SKS, dan (b) Mata Kuliah Prilaku

Berkarya (MPB) Bidang Studi 21 SKS.

4. Pendidikan Ekonomi pada program Sarjana (S1) terdapat 116 Perguruan Tinggi dengan 1.434 Dosen tetap dan 49.526 mahasiswa aktif. Struktur kurikulum Pendidikan Ekonomi S1 ditempuh dengan beban 146 sks yaitu: (a) Mata Kuliah Umum (MKU) 13 SKS, (b) Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 12 SKS, (c) Mata Kuliah Bidang Keahlian dan Penunjang (MKBK) 107 SKS, dan (d) Mata Kuliah Pembelajaran (MKP) 14 SKS
5. Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi S2 rata-rata adalah orang yang sudah bekerja yang ingin meningkatkan karier atau memperluas pilihan bekerja.
6. Data lowongan kerja untuk lulusan S2 pendidikan

ekonomi masih banyak pada fungsi sebagai pendidik di Perguruan Tinggi/ Dosen dengan jumlah per tahun sekitar 10 orang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan terbuka peluang untuk pendirian program S2 pendidikan ekonomi dengan pemenuhan standar persyaratan dari DIKTI.
2. Bagi para peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam populasi yang lebih luas dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaufman, R. d. (1987). *Needs Assessment*. New York: Educational Technology Publications Englewood Cliffs.
- Mandra, S. (2000). *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.